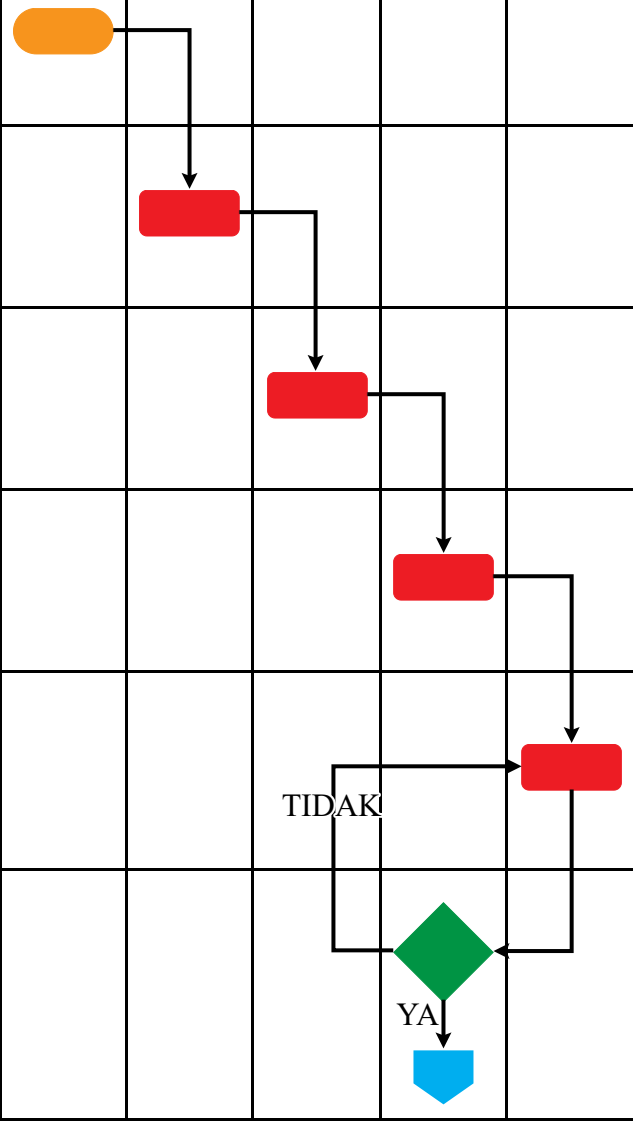
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-107
	TANGGAL PEMBUATAN	8 September 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	14 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undan-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kebutuhan Pegawai 2. Memahami teknik tatacara penyusunan formasi pegaai 3. Memahami melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penyusunan Analisis Jabatan 2. SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja 3. SOP Penyusunan Peta Jabatan 4. SOP Kelas Jabatan	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan formasi JF Pembina Kementerian Hukum akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA KEMENTERIAN HUKUM

No	Kegiatan	MENPAN RB	MENTERI HUKUM	SEKJEN	KARO SDM	KABAG PSI SDM DAN TU	KETUA TIM POKJA	ANGGOTA TIM POKJA	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Jenderal mendisposisikan Surat dari Unit Pembina Teknis tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Instansi Kementerian Hukum kepada Kepala Biro SDM								Surat tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	15 menit	disposisi	-
2	Menerima Disposisi Surat dari Sekretaris Jendral tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian PSDM dan TU								- Disposisi - Surat tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	15 menit	disposisi	-
3	Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro SDM tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah dan mendisposisikan kepada Ketua Tim POKJA								- Disposisi - Surat tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	30 menit	disposisi, arahan	-
4	Menerima Disposisi Surat dari Kepala Bagian PSISDM dan TU, menelaah dan memberi arahan ke Anggota Tim Pokja untuk menyusun kebutuhan pegawaI ASN								- Disposisi - Surat tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	60 menit	disposisi, arahan	-
5	Mengumpulkan, menelaah dan menyusun data usulan kebutuhan pegawai dari masing-masing Unit Satuan Kerja (Satker) berdasarkan data Eksisting, Peta Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Kelas Jabatan								- Arahan - Data usulan kebutuhan pegawai - data eksisting pegawai - peta jabatan - analisa jabatan - anaisa beban kerja - kelas jabatan	15 hari	data usulan kebtuhan pegawai dari masing-masing Satker	-
6	Menerima, memeriksa serta menelaah draf usulan kebutuhan pegawai dan mengajukan ke Kepala Bagian PSISDM dan TU								- draft usulan kebutuhan pegawai - draft nota dinas - surat usulan kebutuhan pegawai	2 Jam	draf usulan kebutuhan pegawai, draf nota dinas serta surat usulan kebutuhan pegawai	-



No	Kegiatan	MENPAN RB	MENTERI HUKUM	SEKJEN	KARO SDM	KABAG PSI SDM DAN TU	KETUA TIM POKJA	ANGGOTA TIM POKJA	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Memeriksa dan memaraf nota dinas serta surat usulan kebutuhan pegawai, sebelum diserahkan kepada kepala Biro SDM								- draft usulan kebutuhan pegawai - draft nota dinas - surat usulan kebutuhan pegawai	2 jam	draf usulan kebutuhan pegawai, draf nota dinas serta surat usulan kebutuhan pegawai	Kabag PSISDM dan TU memaraf nota dinas dan surat usulan kebutuhan pegawai
8	Memeriksa dan menanda tangani nota dinas Kepala Biro SDM kepada Sekretaris Jenderal serta memaraf surat usulan kebutuhan pegawai dan nota dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Hukum, sebelum diserahkan kepada Sekretaris Jenderal								- nota dinas Kepala Biro SDM - draf nota dinas Sekretaris Jenderal - draf surat usulan kebutuhan pegawai	1 jam	- nota dinas Kepala Biro SDM - draf nota dinas Sekretaris Jenderal - draf surat usulan kebutuhan pegawai	-
9	Memeriksa dan menanda tangani nota dinas Kepala Sekretaris Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM, serta memaraf surat usulan kebutuhan pegawai sebelum diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM								- draf surat usulan kebutuhan pegawai	1 jam	- nota dinas Sekretaris Jenderal - draf surat usulan kebutuhan pegawai	-
10	Memeriksa dan menanda tangani surat usulan kebutuhan pegawai, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi								Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	30 menit	Surat Menteri Hukum tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai	-
11	Proses unggah Dokumen Surat Usul Penetapan Kebutuhan Formasi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum pada Aplikasi E=Formasi								Surat Penetapan Kebutuhan Pegawai oleh Menteri Hukum	30 menit	Surat Penetapan Kebutuhan Pegawai oleh Menteri Hukum	Pada Aplikasi E-Formasi
12	KemenPAN-RB Mengeluarkan Persetujuan Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum								Surat Persetujuan Penetapan Kebuthan Formasi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum	2 bulan	-	-

